

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SURABAYA

by Lukman Arif

Submission date: 17-Mar-2023 09:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2039017276

File name: 16._IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_VAKSINASI_COVID-19.pdf (177.4K)

Word count: 4329

Character count: 27045

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SURABAYA

¹RB M. Akbar T. A. P., ²Diaz Virdani, ³Kiki Darma Kasih ⁴Lukman Arif

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: asyafinakbar@gmail.com, ariflukman208@gmail.com

Surabaya, 60294, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to describe implementation of COVID-19 vaccination policy, to find supporting and inhibiting factors or efforts to overcome them in Surabaya city. Theoretical approach used is the George C. Edward III policy implementation approach. This research use qualitative methods with a descriptives approach. Data collection carried out through observation and interviews. Analysis data techniques in this research consisted of data collections, data condensations, data presentations, and drawing conclusions according to Miles-Huberman model. Results show that implementation of COVID-19 vaccination policy in the City of Surabaya in fact found a number of problems in implementation of the COVID-19 vaccination on Surabaya, including realization vaccines to targets far from the target set, the reluctance of potential vaccine recipients to inform the cause of their absence to health facility officers, less the active target group of potential vaccine recipients to come according to the set schedule. Another cause that is no less important is the lack of synchronization of data on potential vaccine recipients obtained by health facilities as administrators, because some of the data entered are potential vaccine recipients who are survivors, some were even found to have vaccinated elsewhere. So, socialization from the local government regarding implementation of COVID-19 vaccination policy in Surabaya City important and provides education. Therefore, researchers suggest that there be improvements and synchronization of data on potential vaccine recipients, so that vaccine recipients are well monitored and integrated.

Keywords: COVID-19; Policy implementation; Vaccination

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19, ditemui faktor yang mendukung dan penghambat serta upaya mengatasinya di Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam teori yaitu Implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam penelitian memakai metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara dan Pengamatan. Analisis data tekniknya pada penelitian ini mencakup pengumpulan data, data di kondensasi, data penyajian, dan kesimpulan ditarik selaras model Miles-Huberman. Hasilnya penelitian menunjukkan Pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya pada realitanya menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Surabaya antara lain realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan, keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya kepada petugas fasilitas Kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain. Maka, sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya menjadi penting dilakukan dan memberikan edukasi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan melakukan adanya perbaikan dan sinkronisasi terhadap data calon penerima vaksin, supaya penerima vaksin terpantau dengan baik dan terpadu.

Keywords: COVID-19; Implementasi kebijakan; Vaksinasi,

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa berdasarkan sensus tahun 2020, Data terbaru menurut kementerian kesehatan pada 4 Mei tahun 2021 secara nasional jumlah yang terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sudah mencapai 1.682.004 dan jumlah yang tewas akibat terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sudah mencapai 45.949. Kemudian, data provinsi di Jawa Timur jumlah yang terpapar Corona-virus Disease 2019 (COVID-19) sudah mencapai 148.398 dan jumlah yang meninggal akibat terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah mencapai 10.772. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk 3.158.943 jiwa berdasarkan data 2019, Data terbaru pada 4 Mei 21 tahun 2021 jumlah terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Surabaya telah mencapai 23.546 dan jumlah yang meninggal akibat terpapar Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mencapai 1.364. Selanjutnya apabila dibandingkan jumlah penduduk di Kota Surabaya 3.158.943 jiwa dan angka yang telah terpapar COVID-19 23.546 maka, persentasenya tergolong cukup banyak. Sehingga upaya yang harus dilakukan, agar jangan sampai menjangkiti yang belum terpapar diperlukan adanya vaksinasi COVID-19 yang merata di Surabaya.

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi bertujuan untuk dapat menurunkan transmisi atau penularan COVID-19, mengurangi angka kematian atau kesakitan karena coronavirus, tercapainya kekebalan imun masyarakat kelompok (herd immunity), menghindari dan menjaga masyarakat sehat, meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah membagi menjadi 6 kelompok sasaran bagi penerima vaksinasi COVID-19 antara lain : sasaran pertama bagi tenaga medis, TNI atau Polisi, aparat hukum serta pelayanan publik; sasaran kedua bagi tokoh spiritual atau masyarakat dan perangkat daerah; sasaran ketiga bagi seluruh tokoh atau tenaga pendidik; sasaran keempat bagi aparatur pemerintah mulai dari pusat, daerah, dan legislative, sasaran kelima bagi penerima bantuan iuran BPJS kesehatan; dan sasaran keenam bagi masyarakat berusia 19-59 tahun. Informasi yang beredar bahwa vaksinasi COVID-19 tidak aman digunakan dan mengandung bahan yang tidak halal. Pemerintah mengharapkan masyarakat tidak menimbulkan isu yang dapat membuat masyarakat resah sehingga dalam pelaksanaan pemberian vaksin ini menjadi lebih merata. Kendala dalam hal kesiapan tenaga medis yang melakukan vaksin COVID-19 dan penyediaan vaksin COVID-19 Kota Surabaya menyebabkan beberapa penolakan oleh masyarakat dikarenakan adanya ketakutan tersendiri dikalangan masyarakat atas efek samping dari vaksin COVID-19 di kemudian hari, Sehingga pemahaman masyarakat akan informasi mengenai vaksinisasi COVID-19 yang benar menjadi penting.

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC USA memberitahukan bahwasannya vaksin merupakan suatu alat pengendalian COVID-19. Keberhasilan menekan laju pandemi ditentukan adanya vaksin dan pelacakan yang tepat serta pencegahan yang konsisten. Dengan hadirnya vaksinasi COVID-19 ini diharapkan menghasilkan kekebalan pada orang yang menerima vaksin, akan tetapi pada proses nya membutuhkan cukup banyak waktu. Vaksinasi COVID 19 ini, persentase setiap individu membutuhkan dua dosis yang terpisah beberapa minggu. Pemerintah penting mempertimbangkan jangkauan vaksinasi COVID-19 pada skala nasional, bukan skala provinsi tetapi juga sampai pada lingkup Kota. Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 Kota Surabaya. Sehingga pada penelitian ini dibahas lebih jauh tentang "Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya".

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020) Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Implementasi adalah suatu perilaku yang mengikuti setiap pikiran awal supaya suatu benar-benar terjadi, Pada tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan (2012: 21-125). Oleh karena itu, Implementasi ialah pelaksanaan dari suatu rencana, ide, model, spesifikasi, standar dan kebijakan apapun saat melakukan sesuatu. George C Edwards III memandang pelaksanaan kebijakan seperti sebuah proses dinamis, yang mana memiliki beraneka ragam faktor yang saling mempengaruhi sebuah pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor ini penting untuk dimunculkan demi mengerti sebuah pengaruh faktor-faktor itu pada implementasi. Sehingga, George C. Edwards III menekankan bahwa pada studi implementasi pertama-tama penting diajukan dua pertanyaan utama yakni :

1. Apa yang menjadi prasyarat pada implementasi suatu kebijakan ?
2. Apa faktor-faktor penting kesuksesan implementasi sebuah kebijakan ?

Merespon pertanyaan tersebut, George C. Edwards III pada tulisan Mustafa lutfi- Kurniawan (2012:121-125) memaparkan empat faktor atau variabel berperan pada pencapaian kesuksesan implementasi suatu kebijakan. Variabel atau Faktor berpengaruh terhadap kesuksesan atau gagalnya implementasi sebuah kebijakan yakni :

- a) Komunikasi; Komunikasi adalah proses menyampaikan suatu kabar dari komunikator pada komunikan. Padahal, komunikasi kebijakan memiliki arti proses menyampaikan kabar kebijakan oleh pembentuk kebijakan ke pelaksana kebijakan. kabar harus di sampaikan ke pelaku kebijakan supaya pelaku kebijakan mengerti substansi, maku, arah, target kebijakan, kemudian pelaksana program bisa menyiapkan perihal hubungan implementasi program, supaya operasi pelaksanaan kebijakan bekerja efisien dan selaras maksud kebijakan tersebut. kabar sebagai faktor pada pelaksanaan suatu kebijakan, utamanya kabar nan signifikan serta terkait cara mengimplementasikan program. Tatkala kewenangan memiliki peran dalam mengamankan bahwasannya kebijakan dilaksanakan sesuai yang dikehendaki. Komunikasi pada implementasi program kebijakan meliputi aspek pokok yakni informasi di transformasi (transmisi), informasi jelas (clarity) dan informasi konsisten (consistency). Aspek petransformasian memaksudkan supaya kabar tak cuma diteruskan terhadap implementator program melainkan pada pihak terkait dan kelompok sasaran. Aspek kejelasan dimaksudkan supaya kabar mudah dimengerti dan jelas, kecuali guna mencegah kelirunya interpretasi oleh implementator kebijakan, target yang dituju ataupun golongan terpaat pada pelaksanaan program. Sebaliknya aspek konsistensi mengharapkan supaya kabar yang di sampaikan perlu konsistensi maka tidak timbul kekhawatiran bagi pelaksana kebijakan, target sasaran ataupun pihak terkait.
- b) Sumber Daya; Sumber Daya mempunyai peran pada pelaksanaan kebijakan betapa jelas dalam konsistensi aturan dan ketentu serta betapa akurat tersampainya aturan atau ketentuan itu, apabila beberapa implementator kebijakan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang efektif sehingga pelaksanaan kebijakan akan efektif. Pelaksanaan kebijakan tak akan sukses tanpa ada support oleh sumberdaya berkualitas serta berkuantitas. mutu sumberdaya terkait keahlian, sumbangsih, profesionalisme, serta kemampuan dirinya, sebaliknya berkuantitas terkait besaran sumber daya apa telah memenuhi keseluruhan target yang dituju. Sumber daya penting pada kesuksesan pelaksanaan, karena dengan sumber daya yang handal, pelaksanaan suatu program akan berjalan baik.
- c) Disposisi; perilaku dan karakter dari implementator program memiliki peran mewujudkan implementasi selaras target dan maksud kebijakan. Pelaksana suatu program perlu mempunyai karakter contohnya komitmen dan ketulusan. Ketulusan memfokuskan pelaksana guna konstan ada pada garis tujuan kebijakan. sebaliknya komitmen besar

oleh implementator program mengaktualkan pelaksana program tetap antusias pada pelaksanaan tugasnya, kewenangan, fungsinya dan kewajibannya sejalan aturan sudah di tetapkan. perilaku pelaksana kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ketika pelaksanaan implementasi mempunyai perilaku yang baik sehingga dapat melaksanakan program dengan baik seperti yang di inginkan dari penyusun kebijakan. jikalau perilakunya mendukung sehingga pelaksanaan berjalan optimal.

- d) Struktur Birokrasi; Susunan pada birokrasi mempunyai dampak relevan terhadap pelaksanaan kebijakan. Jikalau susunan pada birokrasi ini meliputi 2 perihal yakni strukturnya semata dan prosedur. Dimensi kesatu yaitu prosedur, pada pelaksanaan kebijakan umumnya telah di buat standart operasional prosedur (SOP). SOP sebagai panduan oleh setiap pelaksana implementasi pada tindakannya supaya saat implementasi kebijakan sejalan dengan tujuan dan sasaran program. Dimensi dua merupakan susunan birokrasi, susunan birokrasi yang rumit serta terbag-bagi menjurus ke melonggarkan pemeriksaan atau menghasilkan mekanisme berbelit, kompleks serta kemudian akan mengakibatkan kegiatan organisasi menjadi tidak luwes.

Dalam teori yang dijelaskan, tentang implementasi suatu kebijakan oleh George C Edward III (1980) yang dikutip oleh Mustafa lutfi-Kurniawan (2012:121-125), menjadi teori dasar yang mendasari penelitian ini, untuk mengkaji dan memahami keberhasilan ataupun kendala dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya.

Konsep Vaksinasi

Vaksin adalah suatu penawar yang diberikan guna mencegah suatu penyakit. Vaksin mengakomodasi di dalam tubuh untuk menciptakan antibodi. Antibodi memiliki fungsi menjaga dari penyakit, maka tubuh segera siap untuk melawannya.

Tujuan Pemberian adanya Vaksin yaitu memberikan kekebalan pada kalangan seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan maksud menurunkan kematian dan yang terjangkit virus atau penyakit tersebut.

Vaksin pada saat ini suatu alat baru yang penting dalam memerangi Covid-19 di era pandemic sekarang dan sangat menggembirakan melihat begitu banyak vaksin yang terbukti berhasil dan terus dikembangkan.

Syarat- Syarat Penerima Vaksinasi

Syarat-Syarat Penerima Vaksinasi sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Kementrian Kesehatan RI No. HK. 02.02/4/1/2021 mengenai Pengarah proses Implemntasi Vaksinasi Pada Saat Penanggulangan Pandemi COVID-19 mengenai ketentuan penerima Vaksin Covid 19. Berikut sebagian ketentuan yang perlu dipenuhi yaitu:

1. Tidak mempunyai penyakit yang terdapat pada format screening /penapisan.

Penyakit tersebut yaitu telah terpapar Covid 19 derita indikasi awal penyakit infeksi saluran pernapasan contohnya batuk,flu,asma pada kurun waktu 7 hari, saat dapat treatment aktif berpanjangan dalam malfungsi darah, penyakit gagal jantung, ginjal kronis, penyakit hipertiroid dan penyakit kanker.

2. Tidak bunting atau meneteahi.
3. Tidak terdapat komponen keluarga yang koneksi dalam treatment karena terpapar COVID-19.
4. Jikalau menurut pengukuran temperatur badan bakal penerima vaksinisasi tidak sedang panas (temperatur badan dibawah 37.5 C).
5. Jikalau menurut pengukuran tensi darah di dapatkan perolehan diatas 140/90 kemudian vaksin tak diperbolehkan.
6. Pengidap kencing manis jenis dua terkendali serta Hb A1C dibawah 58mmol/mol atau 7,5% diperbolehkan vaksin.

METODOLOGI

Pada penelitian ini peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2016:11) mendefinisikan metodologi pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, beberapa yang dikumpulkan kemungkinan sebagai kunci atas apa yang sudah diteliti. Sementara itu, Sugiyono (2018:225) menyatakan bahwa metodologi pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data dilakukan dari natural setting (kondisi alami), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dalam observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) serta dokumentasi".Lokasi dilakukan di Kota Surabaya. Pengumpulan data berawal dari data sekunder dan data primer. Data diambil selain wawancara responden yang merupakan masyarakat Surabaya, peneliti juga mengambil data dari Dinas Kesehatan Surabaya. Model analisis data yang digunakan yakni model Miles-Huberman, dikutip oleh Saldana (2014: 12- 14). Bagian di dalam analisis data Miles- Huberman dikutip oleh Saldana (2014: 12-14) meliputi: data di kondensasi (*condentation data*), data penyajian(*display data*), dan ditarik kesimpulan (*drawing conclusions*). Bagian kajian data berisi berawal dari membahas bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 84 Tahun 2020 tetang Pelaksanaan Vaksin merupakan salah satu bentuk kebijakan implementasi yang top-down, program tersebut tersentralisasi dari level pemerintah pusat kemudian kepada Pemerintahan Jawa Timur, selanjutnya diteruskan di level bawahnya Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Dari teori implementasi kebijakan menggunakan empat variabel menurut George C Edwards III didapati perihal yang dapat menghambat serta mendukung kebijakann vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya. Kemudian dideskripsikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Kota Surabaya memiliki beberapa inkonsistensi sebab persyaratan calon penerima vaksin tertentu terkadang berubah menyesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan kedepan yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 84 Tahun 2020, hal ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas pada selektivitas penerima vaksin oleh masyarakat. Akan tetapi demikian pelaksanaan suatu komunikasi terhadap masyarakat melalui berbagai media yang disalurkan dengan cukup baik, serta dari masyarakat sendiri cukup dipahami dan jelas. manakala warga butuh informasi mengenai perihal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di tempat itu vaksinasi juga masyarakat sudah menerima informasi yang diperlukan dari vaksinator. Berikutnya hal jadi sedikit rintangan dalam komunikasi ialah ditemui adanya segelintir masyarakat enggan menginformasikan penyebab ketidakhadirannya pada jadwal vaksinasi kepada petugas. Menurut wawancara yang dilakukan, masyarakat enggan karena masih takut terhadap efek samping atau kejadian ikutan (KIPI) setelah dilakukan vaksin terhadap dirinya. kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas dan beberapa penerima vaksin ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain. Sehingga Komunikasi baik antar pemerintah, personil kesehatan, serta masyarakat sangat penting agar tidak terjadi disinformasi.

2. Sumber daya

Sumberdaya yang dimaksudkan yakni meliputi ketersediaan personil atau tenaga kerja di bidang kesehatan yang bisa mensupport proses pelaksanaan kebijakan. Menurut hasil observasi yang dilaksanakan dan informasi yang diperoleh, sumber daya manusia (personel) yang dipakai Dinas Kesehatan di Kota Surabaya pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama yaitu sebanyak 800 petugas vaksinasi yang dikerahkan mengigit pada tahap pertama sasarannya hanya 33.000 orang. Menurut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita sekitar 360.000 orang yang dilaksanakan di beberapa tempat vaksinasi yaitu Balai Kota Surabaya, Markas Kepolisian, dan seluruh puskesmas di Kota Surabaya. Walaupun masih pada batas kapasitas kemampuan yang dimiliki sumber daya, Tetapi saat diobservasi di lapangan, kedepannya diperlukan penambahan ptenaga kesehatan atau vaksinator mengingat semakin besarnya target kelompok sasaran atau calon penerima vaksin COVID-19 di tahap kedua selanjutnya tersebut untuk memperlancar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya.

3. Disposisi

Disposisi adalah kecondongan perilaku yang dipunyai implementator kebijakan bisa berpengaruh pada level keberhasilan kinerja pada pelaksanaan suatu kebijakan. Hingga tokoh implementasi program itu perlu mencerna apa yang mesti dijalankan serta ditunjuk didasarkan pada keterampilan diri dimiliki. Tokoh pelaksana yang dipilih didasarkan pada kemampuan serta waktu tugas kontribusi yang melaksanakan tahapan kualifikasi, padahal guna mengendalikan mutu perilaku para implementator terjun tak cukup cuma lewat konferensi pengoordinasian saja yang rutin dilaksanakan oleh antara unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencakup pimpinan Dinas Kesehatan, pimpinan Puskesmas dan lurah atau didasarkan laporan oleh sesama implementator kebijakan vaksinasi COVID-19 di Surabaya itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparat negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendiri pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan, (La Ode Muhammad Elwan, 2019)

Struktur suatu birokrasi perlu guna pengaturan sumber daya atau implementator yang dapat mengimplementasikan aktivitasnya secara kondusif dan terkoordinasi baik. Pada pelaksanaan suatu program yang elusif atau kompleks dibutuhkan struktur suatu birokrasi yang efektif dan bisa mengoordinasikan personil sumberdaya di dalamnya dengan efisien. susunan suatu birokrasi yang dipakai adalah susunan suatu organisasi di Dinkes Kota Surabaya. Lantaran struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini telah dilakukan pembagian tugas dari pemerintah pusat yang kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke pemerintahan kota pada hal ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Hingga pembagian tugas pokok, wewenang, dan fungsi dalam pelaksanaan vaksinasi lebih efisien, kondusif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan dengan menggunakan perspektif teoritis, empat variabel yang ada di model implementasi suatu kebijakan George C Edwards III dalam implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya cukup memenuhi variabel tersebut. Akan tetapi, masih ditemui kekurangan yang ada dalam implementasi, yakni :

1. Komunikasi; Ditemui masih adanya masyarakat yang merasa takut divaksin sekejam menghambat implementasi kebijakan vaksinasi tetapi bisa diatasi melalui komunikasi lisan dalam bentuk sosialisasi yang diberikan RT serta personel kesehatan atau vaksinator yang ada di tempat vaksinasi.
2. Sumber daya; Sumberdaya manusia yang memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 cukup memadai dan kinerja baik, terlihat saat vaksinasi tahap pertama yang telah dilaksanakan meskipun hanya terdiri dari 800 orang vaksinator tetap mencapai target kelompok sasaran penerima vaksin. Personil tenaga kesehatan ditempat vaksinasi seperti puskesmas serta di Rumah sakit Kota Surabaya memerlukan penambahan vaksinator guna menunjang besaran target kelompok sasaran calon penerima vaksin COVID-19 yang semakin banyak jumlahnya.
3. Disposisi; Para pelaksana kebijakan vaksinasi COVID-19 yang dipilih dan ditunjuk selaras dengan keterampilan yang dipunyai serta dipertimbangkan selektif dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya lalu disebar dibeberapa tempat vaksinasi COVID-19 di Surabaya Seperti puskesmas dan tempat lainnya.
4. Struktur Birokrasi; Susunan suatu birokrasi yang ada ialah susunan di organisasi Dinkes Kota Surabaya. Selain itu juga telah ditentukan mengenai implementasi vaksinasi COVID-19 dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no. 84 tahun 2020 yang dilaksanakan cukup bagus dari implementator kebijakan.

REFERENSI

Coronavirus Cases Update Available from : <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. [Accessed May 4, 2021].

Erdianti, J. J. (n.d.). "Analisis Impementasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lembaga Ketahanan Nasional". *Civil Service*, 13.

George Edward III (1980) dalam Erwan Agus Purwanto, Ph. D. dan Dyah Ratih.

Harapan, H. I. (2020). "Coronaviruss disease 2019 (COVID-19): A literature review". *Journal of Infection and Public Health*.

<http://dinkes.surabaya.go.id/> [Accessed May 3, 2021].

- Indarto, K. D. (2021). "Effectiveness of Policy Implementation in Achievements of The Expected Food Pattern Score (Study in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan)". *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 5 (2), 96-99.
- Kasmad, R. &. (2015). "Democratic Model of Public Policy Accountability. Case Study on Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City". *Jurnal Studi Pemerintahan*, 186-202.
- Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No HK.02.O2/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19.
- La Ode Muhammad Elwan. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. In *Copyright©2019 Journal PUBLICUHO Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University (Vol. 2)*. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- Lundkvist, A. E.-K.-K. (2021). "Policy-makers' views on translating burden of disease estimates in health policies: bridging the gap through data visualization". *Archives of Public Health*, 79 (1), 1-11.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). "Qualitative Data Analysis" (3 ed.). London, United Kingdom.
- Muis, A. (2020). "Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- Pane, M. D. (2020). "Virus Corona (COVID-19)". Available from: <https://www.alodokter.com/virus-corona>. [Accessed April 7, 2021].
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020. Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Putra, F. (2001). "Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik". Pustaka.
- Rachman, F. F. (2020). "Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter". *Indonesian of Information Management Journal (INOHIM)*, 8 (2), 100-109.
- S., A. W. (1997). "Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Said , A., & Madina , R. I. (2015). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Regulasi Daerah Terkait Penerimaan Pajak Reklame (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6 (2).
- Sugiyati, C. (2018). "Analisis atas kebijakan pemerintah tentang BPJS dan JKN melalui UU 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1 (1), 73-85.
- Sulaiman, M. R. (2020). "Update Peta Sebaran Virus Corona di Surabaya" 4 April 2020: Kasus Naik Tajam. Available from: <https://jatim.suara.com/read/2020/04/04/081231/update-petasebaran-virus-corona-di-surabaya-4-april-2020-kasus-naik-tajam>. [Accessed April 9, 2021].
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Noviani Karnita, Novelia Shinta, Rukmaini Rukmaini. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Dalam Program Vaksinasi COVID-19", Citra Delima : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung, 2022 <1 %

Publication
- 2** Rizky Nindya Nunggalsari, Soebijantoro Soebijantoro. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Museum Buwono Keling Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2018 <1 %

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On